

# **Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan**

**Dini Indriyani**

*Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam  
Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan*

*Email: [idini4651@gmail.com](mailto:idini4651@gmail.com)*

**Muhammad Shulthoni**

*Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam  
Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan*

*Email: [m.shulthoni@uingusdur.ac.id](mailto:m.shulthoni@uingusdur.ac.id)*

Received: August 2024, Revised: November 2024, Accepted: December 2024

DOI: <https://doi.org/10.28918/jaais.v5i2.8726>

## **ABSTRACT**

*The change in regional budget standards is to create regional budgets accurately and economically, efficiently, and effectively that represent the interests and aspirations of local communities in relation to regional financial management. Accountability must be fulfilled by the government by looking at the budget, accounting control, and reporting system. The purpose of this study is to determine the effect of accounting control, reporting system, and clarity of budget targets on the accountability of the performance of government agencies of Pekalongan Regency. This research belongs to the type of quantitative research. The data collection method in this study was a questionnaire method using a sample of 51 respondents. Sampling technique by purposive sampling method. This study used a multiple linear regression test data analysis method with the help of SPSS 26. The results showed that accounting control affects the accountability of the performance of government agencies in Pekalongan District. The reporting system and clarity of budget targets do not affect the accountability of the performance of government agencies in Pekalongan District.*

*Keywords: Accounting Control, Reporting System, Clarity of Budget Goals, Accountability for the performance of government agencies*

## **ABSTRAK**

*Perubahan dalam standar anggaran daerah adalah menciptakan anggaran daerah secara akurat dan ekonomis, efisien, dan efektif yang mewakili kepentingan dan*

aspirasi masyarakat daerah dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas harus terpenuhi oleh pemerintah dengan melihat anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode kuesioner dengan menggunakan sampel sebanyak 51 responden. Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode analisis data uji regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pekalongan.

*Keywords: Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*

## **PENDAHULUAN**

Akuntabilitas harus terpenuhi oleh pemerintah dengan melihat anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan, sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terkait Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 terkait Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah. Persoalan laporan catatan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menempatkan Kabupaten Pekalongan berada di posisi bawah menjadi fenomena yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan informasi dari <https://jateng.tribunnews.com/> Kabupaten Banyumas berada di peringkat paling tinggi penilaian SAKIP 2023 se Jawa Tengah dengan nilai 80,53 atau A (memuaskan). Kota Pekalongan mendapatkan predikat sangat baik (BB) dengan nilai 77,12 (<https://organisasi.pekalongankota.go.id>). Sedangkan Kabupaten Pekalongan berada dibawah BB, kondisi ini sama dengan tahun 2021 yang mana Kabupaten Pekalongan memperoleh nilai B (baik) dari yang sebelumnya memperoleh nilai CC (cukup) (<https://gpriority.co.id/>).

Beragam kesimpulan diambil dari penelitian mengenai pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan sasaran anggaran pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran serta pengendalian akuntansi pada akuntabilitas kinerja badan penelitian serta pengembangan Provinsi Sumatera Barat merupakan riset yang dilakukan (Nela & Meirina, 2023). Temuan penelitian membuktikan bahwa akuntabilitas kinerja dipengaruhi kejelasan sasaran anggaran. Selain itu, Akuntabilitas Kinerja tidak terpengaruh Pengendalian Akuntansi. (Aprilianti, D., Wulan, M., & Kurniawan, H. 2020) melakukan penelitian berjudul “pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian intern, serta sistem pelaporan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah Kecamatan Jakarta Selatan.” Temuan penelitian ini menghasilkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sementara itu, sistem pengendalian internal serta pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Adanya ketidakkonsistenan dari masing-masing variabel pada riset terdahulu, sehingga peneliti ingin melakukan riset kembali guna menguji apakah terdapat perbedaan hasil dari riset terdahulu. Adapun pembaharuan dalam riset ini yakni terletak pada waktu, objek, dan variabel penelitian. Oleh karena itu, peneliti mengamati keterkaitan yang lebih komprehensif antara variabel bebas dan variabel terikat dengan mempertimbangkan fenomena yang terjadi di OPD Kabupaten Pekalongan dengan judul “Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pekalongan”.

## **TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)**

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah (*steward*) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan) (Novanaya Tilana, 2023).

### **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Akuntabilitas kinerja pemerintah mengacu pada kewajiban untuk menjaga akuntabilitas pihak-pihak yang berwenang yang meminta informasi tentang tanggung jawab atau penjelasan tentang perilaku individu, organisasi, atau badan hukum dan memberikan informasi yang mereka butuhkan kepada pihak-pihak tersebut. Sesuai definisi yang diuraikan, tanggung jawab utama seluruh lembaga pemerintah, lembaga negara, badan, dan lembaga pusat/daerah adalah memahami sejauh mana akuntabilitas. Permintaan akuntabilitas seperti berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan instansi terkait (Sanusi, 2023).

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diukur dengan serangkaian indikator seperti: kejelasan sasaran anggaran suatu program, penetapan visi dan misi dengan rencana strategik organisasi, indikator kinerja untuk setiap kegiatan, analisis keuangan, penyusunan laporan kegiatan, pemeriksaan rangkaian program, pengendalian pelaksanaan aktivitas, manfaat LAKIP, hubungan capaian kinerja dengan program serta kebijakan (Febriani, 2023).

### **Pengendalian Akuntansi**

Peran utama akuntansi dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada atasan untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Terkait dengan pengukuran kinerja terutama pengukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas, akuntansi manajemen memiliki peran utama dalam pengendalian organisasi yaitu mengkuantifikasi keseluruhan kinerja terutama dalam ukuran moneter. Informasi akuntansi merupakan pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Informasi akuntansi umumnya

disampaikan dalam bentuk ukuran finansial, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dari tiap-tiap unit organisasi yang pada akhirnya membentuk gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan. Lebih lanjut informasi akuntansi memungkinkan bagi organisasi untuk mengintegrasikan aktivitas organisasi (Mardiasmo, 2018).

Pengendalian akuntansi diukur dengan serangkaian indikator seperti: audit sebagai alat pengambil keputusan, evaluasi sistematis, target anggaran sebagai alat pengambil keputusan, jangka waktu sebagai alat pengambil keputusan, bukti pendukung setiap transaksi, catatan transaksi, pembaruan catatan akuntansi, persetujuan laporan keuangan oleh kepala bagian keuangan (Febriani, 2023).

### **Sistem Pelaporan**

Laporan kinerja merupakan suatu dokumen apabila disusun dan disampaikan secara terorganisir dan terlembaga, akan menggambarkan bagaimana kementerian, lembaga pemerintah daerah, lembaga pemerintah pada beragam tingkat, serta lembaga yang mengaplikasikan dan mengendalikan sumber daya negara yang telah menerapkan akuntabilitas kinerja. Laporan kinerja tahunan disebut juga dengan laporan akuntabilitas kinerja instansi. Laporan kinerja biasanya disertakan dengan laporan akuntabilitas. Dengan demikian, laporan kinerja tahunan dan laporan akuntabilitas kinerja pada hakikatnya adalah sama, begitu pula dengan LAKIP. Dalam pengaturan administrasi dan manajemen berbasis teknologi informasi, sistem pelaporan terintegrasi ke dalam sistem informasi dan dipergunakan untuk berbagai hal, terutama sebagai mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk fungsi manajemen (Hafzhan, 2021).

Sistem Pelaporan diukur dengan serangkaian indikator seperti: penyajian laporan keuangan secara lengkap, informasi laporan keuangan dimanfaatkan untuk alat koreksi, informasi keuangan ditunjukkan guna melengkapi kebutuhan khusus, laporan keuangan bisa diuji, informasi keuangan bisa dimengerti oleh pengguna serta dicocokkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya (Febriani, 2023).

### **Kejelasan Sasaran Anggaran**

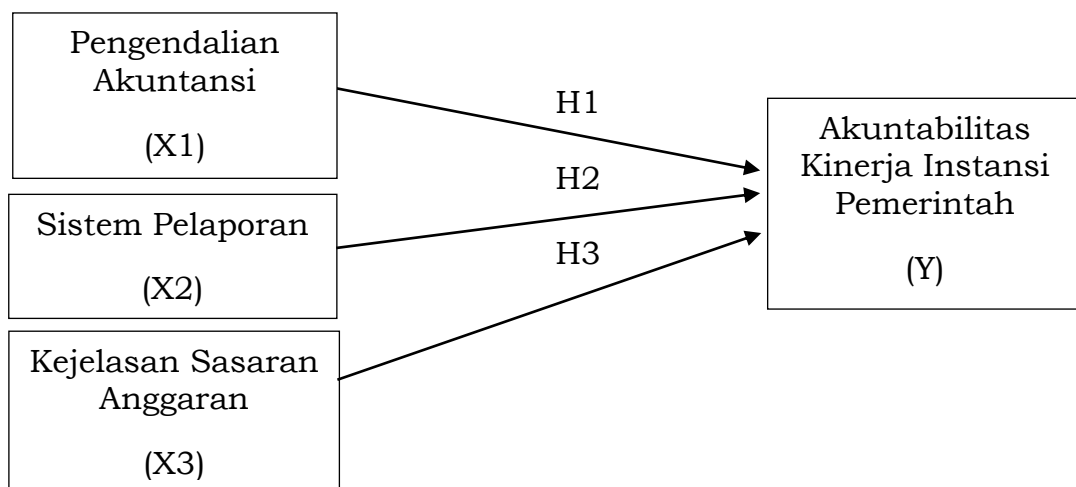
Kejelasan sasaran anggaran merupakan sasaran dibuat dengan kondisi transparan serta dimengerti pihak yang bertanggung jawab agar tercapai. Oleh karena itu, tingkat pengaruh dalam penyusunan target anggaran dapat digunakan untuk mengukur kejelasan sasaran anggaran. Serta bisa mempengaruhi akuntabilitas pemerintah serta berhubungan pada peran pemerintah dalam melayani masyarakat, maka kejelasan sasaran anggaran sangat relevan serta signifikan dalam ranah pemerintah. Sejauh mana tujuan anggaran dirinci sedemikian rupa sehingga orang yang memiliki tanggung jawab dapat menjangkau target serta dapat memahami anggaran tersebut dikenal sebagai kejelasan anggaran. Sasaran anggaran diperkirakan akan berdampak pada akuntabilitas lembaga pemerintah baik tidak langsung ataupun secara langsung. Pegawai akan berkinerja sesuai dengan yang diharapkan jika target anggaran jelas, dan tingkat kinerja dapat dicapai dengan mengetahui target anggaran. Motivasi akan berperan

dalam mencapai kinerja ini karena karyawan yang termotivasi lebih mungkin memberikan hasil yang diharapkan (Hafzhan, 2021).

Kejelasan sasaran anggaran diukur dengan serangkaian indikator seperti: kesesuaian rencana kerja dan anggaran RAPBD, sasaran anggaran yang nyata dan detail, keterampilan serta pengetahuan, faktor yang mendukung tujuan instansi, ketetapan anggaran dengan realisasi (Febriani, 2023).

**Kerangka Penelitian**

Kerangka penelitian digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan antara variabel independen dan dependen serta menguji hipotesis secara sistematis. Peneliti menggambarkan kerangka penelitian ini sebagai berikut:



**Pengembangan Hipotesis**

**Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Menetapkan standar, mendapatkan umpan balik dalam bentuk kinerja aktual, dan mengambil tindakan yang tepat ketika kinerja aktual sangat menyimpang dari rencana awal merupakan proses pengendalian. Informasi akuntansi yang dihasilkan suatu instansi pemerintah dengan menggunakan prosedur akuntansi yang baik dan sistem akuntansi yang dapat diandalkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja instansi tersebut. Kinerja lembaga pemerintah akan meningkat sebanding dengan kualitas prosedur pengendalian akuntansi. Hal ini berhubungan dengan teori stewardship, dimana pemerintah sebagai steward harus mengontrol dan mengevaluasi semua kegiatan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh masing-masing instansi.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan (Mikoshi, 2020) membuktikan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Maka hipotesis dapat dinyatakan:

H<sub>1</sub> : Pengendalian Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## **Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Ketika anggaran yang dialokasikan diimplementasikan, kinerja manajemen perlu dikendalikan dengan sistem pelaporan yang efisien. Laporan umpan balik diperlukan agar manajemen memahami hasil pelaksanaan program ataupun capaian target anggaran. Hal ini memungkinkan manajemen untuk menilai langkah-langkah yang diambil guna mengembangkan kinerja serta akuntabilitas ketika menerapkan anggaran atau rencana. Sebagai pengelola dana publik, pemerintah daerah wajib menyajikan data keuangan yang dibutuhkan dengan tepat waktu, akurat, serta bisa diandalkan.

Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* dimana pemerintah akan terbantu oleh sistem pelaporan yang jelas sehingga menjadikan pemerintah daerah mudah menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya dalam menyampaikan laporan sebagai wujud akuntabilitas. Berdasarkan teori *stewardship*, Pemerintah Daerah merupakan suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat. Agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai maksimal maka pemerintah harus bertindak secara ekonomis dan efisien dalam hal pemanfaatan sumber daya serta membuat pertanggungjawaban yang telah diamanahkan. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka *steward* dapat menerapkan anggaran berbasis kinerja, mengarahkan segala kemampuan dan keahliannya selain itu juga dapat menerapkan kepemimpinan yang efektif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Tilana, 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan Pratama, dkk (2023) membuktikan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Maka hipotesis dapat dinyatakan:

H<sub>2</sub> : Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Kejelasan sasaran anggaran mengacu dari seberapa baik tujuan anggaran dijelaskan dan dihubungkan sehingga penanggung jawab pelaksanaannya dapat memahaminya. Anggaran pemerintah harus sejalan dengan maksud dan tujuannya. Akuntabilitas kinerja akan terpengaruh jika anggaran tidak mencerminkan tujuan yang jelas. Untuk itu, anggaran perlu jelas agar dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja dan memberikan manfaat yang baik.

Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran memudahkan penerapan tugas organisasi untuk memenuhi tujuan beserta sasaran yang telah ditetapkan lebih dahulu. Hal ini berhubungan dengan teori *stewardship* yang dimana dalam memotivasi pegawai bekerja keras untuk kepentingan organisasi dengan penghargaan yang tidak nyata menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih diarahkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Tilana, 2023).

Penelitian Isnanto, dkk (2019) membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H<sub>3</sub> : Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif yang memfokuskan pada data primer. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pekalongan yang menjadi populasi dalam penelitian ini dan diperoleh 17 OPD yang terdiri dari dinas-dinas yang ada di Kabupaten Pekalongan dengan total responden sebanyak 51 responden yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*.

Dalam penelitian ini Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Kejelasan Sasaran Anggaran adalah variabel independen, sedangkan variabel dependen adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Data penelitian diolah menggunakan perangkat lunak pengolahan data SPSS versi 26.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Uji Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif merupakan penggambaran mengenai ringkasan data dari tiap variabel yang masuk dalam proses pengujian, dengan tujuan agar memudahkan dalam memahami data, dimulai dari jumlah data (N), nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar penyimpangan data (std deviasi).

**Tabel 1 Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
X1	51	30	40	1739	34.10	3.094
X2	51	16	25	1084	21.25	1.988
X3	51	16	25	1083	21.24	2.103
Y	51	34	45	1973	38.69	3.586

Sumber: Output spss versi 26

**Uji Validitas**

**Tabel 1 Uji Validitas**

No	Variabel	Butir Instrumen	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	Pengendalian Akuntansi (X1)	PA 1	0,804	0,271	Valid
		PA 2	0,605	0,271	Valid
		PA 3	0,812	0,271	Valid
		PA 4	0,646	0,271	Valid

		PA 5	0,834	0,271	Valid
		PA 6	0,77	0,271	Valid
		PA 7	0,861	0,271	Valid
		PA 8	0,768	0,271	Valid
2	Sistem Pelaporan (X2)	SP 1	0,676	0,271	Valid
		SP 2	0,689	0,271	Valid
		SP 3	0,785	0,271	Valid
		SP 4	0,813	0,271	Valid
		SP 5	0,874	0,271	Valid
3	Kejelasan Sasaran Anggaran (X3)	KSA 1	0,843	0,271	Valid
		KSA 2	0,776	0,271	Valid
		KSA 3	0,765	0,271	Valid
		KSA 4	0,859	0,271	Valid
		KSA 5	0,809	0,271	Valid
4	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	AKIP 1	0,656	0,271	Valid
		AKIP 2	0,834	0,271	Valid
		AKIP 3	0,871	0,271	Valid
		AKIP 4	0,786	0,271	Valid
		AKIP 5	0,918	0,271	Valid
		AKIP 6	0,881	0,271	Valid
		AKIP 7	0,929	0,271	Valid
		AKIP 8	0,859	0,271	Valid
		AKIP 9	0,882	0,271	Valid

Sumber: Output spss versi 26

Berdasarkan tabel 2 bahwa item pernyataan memenuhi syarat validitas karena  $r$  hitung >  $r$  tabel pada taraf signifikansi 5%.

### Uji Reliabilitas

**Tabel 3 Uji Validitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
Pengendalian akuntansi (X1)	0,885	0,60	Reliabel
Sistem pelaporan (X2)	0,822	0,60	Reliabel
Kejelasan Sasaran Anggaran (X3)	0,863	0,60	Reliabel
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Y)	0,951	0,60	Reliabel

Sumber: Output spss versi 26

Tabel 3 membuktikan bahwa seluruh pernyataan dengan nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60 untuk setiap variabel penelitian dianggap reliabel.

### Uji Normalitas

**Tabel 4 Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

Asymp. Sig. (2-tailed)	.200
------------------------	------

Sumber: Output spss versi 26

Tabel 4 memberikan penjelasan hasil uji kolmogorov-smirnov nilai asymptotic significant (2-tailed) sebesar 0,200 dimana lebih besar dari 0,05 sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa data variabel berdistribusi normal.

**Uji Multikolinearitas**

**Tabel 5 Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengendalian Akuntansi	0,392	2,553	Tidak terjadi multikolinearitas
Sistem Pelaporan	0,371	2,697	Tidak terjadi multikolinearitas
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,295	3,390	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Output spss versi 26

Dilihat tabel 5 nilai *tolerance* variabel pengendalian akuntansi sejumlah 0,392, sistem pelaporan sebesar 0,371, serta kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,295 lebih besar dari 0,1. Sedangkan nilai VIF bagi variabel pengendalian akuntansi yaitu  $2,553 < 10$ , sistem pelaporan sebesar  $2,697 < 10$ , dan kejelasan sasaran anggaran sebesar  $3,390 < 10$ . Hal ini membuktikan bahwasanya tidak terdapat multikolinearitas atas model regresi penelitian ini.

**Uji Heteroskedasitas**

**Tabel 6 Uji Heteroskedasitas**

Variabel	Sig	Keterangan
Pengendalian Akuntansi	0,965	Tidak terjadi heteroskedasitas
Sistem Pelaporan	0,254	Tidak terjadi heteroskedasitas
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,882	Tidak terjadi heteroskedasitas

Sumber: Output spss versi 26

Tabel 6 menjelaskan bahwa nilai signifikan pengendalian akuntansi sebesar 0,965 atau  $0,965 > 0,05$  membuktikan bahwa nilai variabel independen lebih besar dari 0,05 dan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Nilai signifikan sistem pelaporan yaitu 0,254 yang menunjukkan  $0,254 > 0,05$  atau nilai variabel independen lebih besar dari 0,05 menunjukkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas karena nilai signifikan kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,882 atau  $0,882 > 0,05$  yang membuktikan bahwasanya nilai variabel independen lebih besar dari 0,05.

**Uji Regresi Linier Berganda**

**Tabel 7 Uji Regresi Linier Berganda**

Model	B	Std. Error	t	Sig.
Konstanta	4.059	2.763	1.469	.148
Pengendalian Akuntansi	.955	.120	7.939	.000
Sistem Pelaporan	-.286	.192	-1.485	.144

Kejelasan Sasaran Anggaran	.382	.204	1.875	.067
----------------------------	------	------	-------	------

Sumber: Output spss versi 26

Tabel 7 menghasilkan persamaan analisis regresi linier berganda yaitu:

$$AKIP = 4,059 + 0,955 - 0,286 + 0,382 + e$$

Untuk variabel pengendalian akuntansi (X1) koefisien regresinya bertanda positif yaitu 0,955. Ini membuktikan bahwa variabel pengendalian akuntansi (X1) serta variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) mempunyai hubungan yang positif. Variabel sistem pelaporan (X2), koefisien regresinya memiliki nilai negatif yaitu -0,286. Ini membuktikan bahwa tidak ada hubungan antara variabel sistem pelaporan (X2) dengan variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Variabel kejelasan sasaran anggaran (X3), koefisien regresi mempunyai nilai positif yaitu 0,382. Ini membuktikan bahwasanya variabel kejelasan sasaran anggaran (X1) serta variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) mempunyai hubungan positif.

**Uji Parsial (Uji t)**

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat dijelaskan yaitu:

- 1) Variabel pengendalian akuntansi diketahui nilai t-hitung yaitu 7,939 dengan signifikansi 5%. Karena t-hitung untuk variabel X1 (7,939) > (2,011) dengan nilai 0,000 < 0,05 disimpulkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga menghasilkan Ha<sub>1</sub> diterima serta Ho<sub>1</sub> ditolak.
- 2) Variabel sistem pelaporan dengan nilai t-hitung yaitu -1,485 dengan signifikansi 5%. Karena t-hitung untuk variabel X2 (-1,485) < (2,011) dengan nilai signifikansi 0,144 > 0,05 disimpulkan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga menghasilkan Ha<sub>2</sub> ditolak serta Ho<sub>2</sub> diterima.
- 3) Variabel kejelasan sasaran anggaran dengan nilai t-hitung yaitu 1,875 dengan signifikansi 5%. Karena t-hitung untuk variabel X3 (1,875) < (2,011) dengan nilai signifikansi yaitu 0,067 > 0,05 disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga menghasilkan Ha<sub>3</sub> ditolak serta Ho<sub>3</sub> diterima.

**Uji Simultan (Uji f)**

**Tabel 8 Uji Simultan (Uji f)**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	515.390	3	171.797	63.284	.000 <sup>b</sup>
Residual	127.590	47	2.715		
Total	642.980	50			

Sumber: Output spss versi 26

Tabel 8 membuktikan hasil F-hitung  $63,284 > F\text{-tabel } 3,19$  dan menghasilkan nilai signifikansi  $F(0,000) < \alpha = 0,05$ . Diambil kesimpulan bahwa variabel pengendalian akuntansi (X1), sistem pelaporan (X2), kejelasan sasaran anggaran (X3) mempunyai pengaruh terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y), sehingga menghasilkan keputusan  $H_{a4}$  diterima serta  $H_{o4}$  ditolak.

**Uji Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>)**

**Tabel 9 Uji Simultan (Uji f)**

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.895 <sup>a</sup>	.802	.789	1.64763

Sumber: Output spss versi 26

Tabel 9 membuktikan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 89,5% ataupun  $0,895 \times 100\%$ . Ini menjelaskan adanya keterkaitan antara pengendalian akuntansi (X1), sistem pelaporan (X2), dan kejelasan sasaran anggaran (X3) sebagai variabel independen, dengan variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) karena mempunyai korelasi positif yang kuat dan mendekati angka 1. Nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) yaitu  $0,802 \times 100\% = 80,2\%$  menjelaskan bahwa pengaruh ataupun kontribusi variabel independen pada variabel terikat yaitu 80,2%, serta sisanya yaitu 20,8% dipengaruhi variabel ataupun faktor yang tidak diteliti.

**PEMBAHASAN**

**Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Variabel pengendalian akuntansi berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan bukti dari *output* pengujian hipotesis uji t, dengan signifikansi yaitu  $0,000 < 0,05$ . Sedangkan variabel pengendalian akuntansi memiliki nilai koefisien regresi positif 0,955. Nilai koefisien regresi membuktikan bahwa variabel pengendalian akuntansi dipengaruhi oleh variabel akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu dapat dikatakan  $H_{a1}$  diterima dan  $H_{o1}$  ditolak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pekalongan telah efektif menerapkan sistem pengendalian akuntansi yang selaras dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Guna mempersiapkan akuntabilitas kinerja, pimpinan serta *stakeholders* harus menunjukkan kepedulian yang besar terhadap pengendalian akuntansi yang baik. Taraf akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam memenuhi target serta tugasnya meningkat seiring dengan tingkat kepedulian yang diungkapkan. Hasil dalam penelitian ini didukung oleh teori *stewardship*, pemerintah sebagai *steward* yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran harus bertindak demi kepentingan masyarakat, kepentingan publik, dan kepentingan lembaganya, sehingga dapat

diandalkan dan dapat mencapai tujuan pengelolaan anggaran yang maksimal.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Mikoshi (2020), Ningsih et al. (2022), Anisa, I. N., & Haryanto (2022) yaitu pengendalian akuntansi secara simultan mempunyai pengaruh atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pengendalian akuntansi terbukti meningkat sehingga meningkatkan pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengendalian akuntansi berperan penting dalam tata kelola pemerintahan karena untuk mengevaluasi dan mengontrol kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sudah berjalan dengan efektif dan efisien. Pemerintah

Penelitian ini berbeda dari penelitian Mulya & Fauzihardani (2022), yang menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi tidak memiliki pengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tanggung jawab kinerja tidak sepenuhnya berhubungan dengan pengendalian akuntansi, karena pengendalian akuntansi meliputi rencana yang berkaitan dengan data akuntansi dan berhubungan langsung dengan pengamanan asset dan keandalan catatan keuangan.

### **Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Hasil analisis regresi liner berganda penelitian di atas membuktikan bahwasanya nilai koefisien regresi variabel sistem pelaporan yaitu  $-0,286$  serta sangat rendah. Nilai t-hitung ( $-1,485$ ) pada uji t di atas lebih kecil dari nilai t tabel ( $2,011$ ), serta nilai sig.t  $0,144 > 0,05$ . Ini menjelaskan bahwasanya variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tidak dipengaruhi variabel sistem pelaporan. Disimpulkan  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Penelitian ini membuktikan bahwa sistem pelaporan dinas Kabupaten Pekalongan tidak bergantung pada penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga menunjukkan kegiatan pelaporan keuangan belum mencapai potensi maksimalnya. Kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pekalongan dituntut lebih akuntabel dengan melakukan perbaikan dan optimalisasi sistem pelaporan.

Penelitian ini selaras dengan penelitian Mulya & Fauzihardani (2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem pelaporan terutama dalam menjaga dan menjamin keakuratan serta keandalan dokumen keuangan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Ningsih et al. (2022) yang membuktikan bahwa sistem pelaporan memiliki pengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem pelaporan telah diterapkan dengan baik dan maksimal, hal ini terlihat dari diimplementasikannya penyajian laporan keuangan secara lengkap dan informasi keuangan yang digunakan dapat menjadi alat koreksi jika terjadi kesalahan dimasa lalu.

### **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Sesuai temuan analisis regresi linier berganda dalam penelitian di atas, nilai koefisien regresi variabel kejelasan sasaran anggaran yaitu 0,382. Nilai t-hitung pada uji t di atas  $1,875 < \text{nilai } t \text{ tabel } (2,011)$ , serta nilai sig.t yaitu  $0,067 > 0,05$ . Ini membuktikan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel kejelasan sasaran anggaran dan variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk itu disimpulkan  $H_0$ 3 diterima serta  $H_a$ 3 ditolak.

Sasaran anggaran meliputi perencanaan strategis, penetapan kinerja, dan pelaporan kinerja masih belum jelas sehingga menghambat pelaksanaan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara baik, dibuktikan tidak konsistennya hasil antara kejelasan sasaran anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jika ada sasaran anggaran yang ditetapkan, akan lebih mudah tanggung jawabnya mengenai berhasil ataupun tidaknya tugas organisasi yang dilakukan guna tercapainya tujuan serta sasaran.

Penelitian ini selaras dengan penelitian Septiani Siska, Deditri Yulia Siska (2022), hasil dari penelitian membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena kejelasan sasaran anggaran itu harus ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

Penelitian ini berbeda dari penelitian Ningsih et al. (2022), membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai instansi pemerintah sudah memahami dengan benar mengenai tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaannya serta pengukuran kerjanya sudah sesuai dengan standar sehingga alokasi tujuan anggaran dapat dicapai dan indikator kinerja instansi pemerintah akan tercapai. Pemerintah

### **Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Hipotesis penelitian keempat menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipengaruhi pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, serta kejelasan sasaran anggaran.  $63,284 > 3,19$  dengan nilai signifikansi  $f = 0,000$   $\alpha = 0,05$  merupakan hasil perbandingan f-hitung pada penelitian ini sesuai dengan hasil hipotesis pada uji simultan. Selain itu, nilai konstanta bernilai positif sebesar 4,059. Untuk itu disebutkan bahwa variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipengaruhi oleh pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, serta kejelasan sasaran anggaran secara bersamaan. Disimpulkan bahwasanya  $H_0$ 4 ditolak serta  $H_a$ 4 diterima.

Penelitian ini menunjukkan dampak signifikan sistem pelaporan, pengendalian akuntansi, serta kejelasan sasaran anggaran pada peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tujuan organisasi pemerintah bisa lebih mudah dicapai dengan meningkatkan kinerja akuntabilitas melalui penggunaan pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, serta sasaran anggaran yang jelas. Untuk mempersiapkan akuntabilitas kinerja, pimpinan dan *stakeholders* kepentingan harus menunjukkan kepedulian yang besar terhadap pengendalian akuntansi yang baik. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten

Pekalongan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya derajat kepedulian. Sistem pelaporan yang sesuai terhadap peraturan mempunyai dampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pekalongan. Berdampak pada berhasilnya laporan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah. Agar instansi pemerintah bisa melaksanakan serta menjaga akuntabilitas kerjanya dengan baik, diperlukan anggaran yang dipersiapkan dengan baik, jelas dan mudah dipahami.

Penelitian ini selaras dengan penelitian Hafzhan (2021) yaitu pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, serta kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan kejelasan sasaran anggaran yang jelas dapat meningkatkan kinerja manajerial khususnya pada pengelolaan keuangan pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## **SIMPULAN**

Pengendalian akuntansi berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pekalongan. Artinya kinerja instansi pemerintah meningkat sebanding atas kualitas pengendalian akuntansi yang diaplikasikan pemerintah. Sistem pelaporan tidak berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas Kabupaten Pekalongan. Artinya jika suatu instansi masih belum menerapkan sistem pelaporan dengan baik, sehingga keberhasilan suatu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum terlaksana secara maksimal. Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas Kabupaten Pekalongan. membuktikan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum terealisasi secara terstruktur karena suatu instansi belum melaksanakan sasaran anggaran yang jelas. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas Kabupaten Pekalongan secara bersamaan dipengaruhi oleh pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, serta kejelasan sasaran anggaran. Artinya untuk mempersiapkan akuntabilitas kinerja, pimpinan dan *stakeholders* harus menunjukkan kepedulian yang besar terhadap pengendalian akuntansi yang baik. Taraf akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Pekalongan menjadi berkembang seiring dengan meningkatnya kepedulian. Sistem pelaporan yang sesuai dengan peraturan berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Pekalongan. Ini berdampak pada keberhasilan laporan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah. Instansi pemerintah bisa melaksanakan serta melindungi akuntabilitas kerjanya secara baik, diperlukan anggaran yang dipersiapkan dengan baik, jelas dan mudah dipahami.

Berdasarkan hasil kesimpulan, penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu data penelitian bersumber atas jawaban tertulis responden yang mungkin tidak menggambarkan keadaan yang ada secara akurat. Selain itu, variabel pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, serta kejelasan sasaran anggaran hanya digunakan dalam penelitian ini, sehingga ada kemungkinan variabel lain untuk memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan yang telah dipaparkan, maka penelitian ini memiliki saran yaitu Dinas Kabupaten Pekalongan diharapkan senantiasa berupaya menjaga dan memaksimalkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penyempurnaan serta optimalisasi sistem pelaporan, pengendalian akuntansi, serta kejelasan sasaran anggaran. Pegawai dinas Kabupaten Pekalongan diharapkan senantiasa berupaya memperhatikan sistem pelaporan serta kejelasan sasaran anggaran, karena aspek tersebut bisa mengoptimalkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan pengawasan yang teliti. Peneliti selanjutnya dianjurkan terkait objek penelitian agar diperluas lagi, menambah referensi, serta menambah variabel penelitian selain yang sudah diteliti guna mengembangkan penelitian yang terkait penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, I. N., & Haryanto, H. (2022). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di masa pandemi covid-19. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 9(1). <https://doi.org/10.17977/um004v9i12022p077>
- Aprilianti, D., Wulan, M., & Kurniawan, H. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2). <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i2.454>
- Febriani, D. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Emperis Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo).
- Hafzhan, M. (2021). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan.*
- Isnanto, Y., Suharno, & Widarno, B. (2019). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.* <https://doi.org/10.32663/jaz.v2i2.989>
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. *Akuntansi Sektor Publik.*
- Mikoshi, M. S. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Koni Se Sumatera Barat). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 192. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.116>
- Mulya, H. G., & Fauzihardani, E. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1), 192–212. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i1.463>

- Nela, H. P., & Meirina, E. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Di Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat. : : *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2). <http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/jeamm/article/view/1270>
- Ningsih, S. W., Yusuf, M., & Andayani, T. D. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *The 16th University Research Colloquium 2022*, 863–880. <http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/2392>
- Novanaya Tilana, D. (2023). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya) (Doctoral dissertation, STIE Bank BPD Jateng)*.
- Padmadiani, R., Blongkod, H., & Wuryandini, A. R. (2023). *The Influence Of Clarity Of Budget Targets And Internal Control On The Performance Accountability Of Government Institutions (Study In Regional Apparatus Organizations In Gorontalo District)*. 7(1), 240–251.
- Pratama, D. A., Hanif, R. A., & Sari, R. N. (2023). Pengaruh Kompetensi, Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, dan Pengendalian Akuntansi Terhadap AKIP. ... *Pajak Dan Bisnis (Journal of ...*, 4(1), 31–40. <https://mail.stpi-pajak.ac.id/jurnal/index.php/JPB/article/view/61%0Ahttps://mail.stpi-pajak.ac.id/jurnal/index.php/JPB/article/download/61/56>
- R Baharuddin Umar, Rustan, D., & Sylvia. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Pelopor Manajemen Indonesia*, 2(3), 249–260.
- Sanusi, P. R. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening Pada Skpdpemerintah Kabupaten Kotabaru. *10*(2).
- Septiani Siska, Defitri Yulia Siska, S. J. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi .... *Jurnal Ekonomi, Bisnis ...*, 1(3), 1–21. <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/EBISMEN/article/view/67>